

## **RESPONSIBILITAS PELAYANAN IMUNISASI DI PUSKESMAS PASSITALLU DALAM PERSPEKTIF GOOD EXECUTIVE GOVERNANCE KABUPATEN KEPULAUAN**

**Alimuddin<sup>1\*</sup>, Andi Rosdianti Razak<sup>2</sup>, Hafiz Elfiansya Parawu<sup>3</sup>**

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### **Abstract**

*This study purposed to describe the Responsibility of Immunization Services at Passitallu Public Health Center in the Perspective of Good Executive Governance in Selayar Islands Regency. The research approach used descriptive qualitative. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Informants in this study were 8 people who were selected purposively. The data analysis technique used interactive miles model. The results of this study indicated that the responsibility for immunization services at the Passitallu Public Health Center in the perspective of Good Executive Governance through 3 stages, the first was having commitment to carry out responsibility and authority by having their respective responsibilities and the main duties and functions of each member in the health center in immunization services, the second was having a HR management policy. (Human resources) Management was carried out with each member given the responsibility in each village to carry out immunizations in each village, and the third was having a policy of managing facilities and infrastructure that is adequate in terms of immunization equipment.*

**Keywords:** *responsibility, immunization services, public health center*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Responsibilitas Pelayanan Imunisasi Di Puskesmas Passitallu Dalam Perspektif Good Executive Governance Kabupaten Kepulauan Selayar pendekatan penelitian menggunakan deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang dipilih secara purposive, Teknik analisis data menggunakan model interaktif miles. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responsibilitas pelayanan imunisasi di Puskesmas Passitallu Dalam Perspektif Good Executive Governance melalui 3 tahap yaitu pertama memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenang dengan memiliki tanggung masing – masing dan tupoksi setiap anggota di puskesmas dalam pelayanan imunisasi, kedua memiliki kebijakan pengelolaan SDM (sumber daya manusia) Pengelolaan dilakukan dengan setiap anggota diberikan tanggung masing di setiap desa untuk melakukan imunisasi di setiap desa, dan ketiga memiliki kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana sudah memadai dalam hal perlengkapan alat imunisasi.

**Kata Kunci:** *responsibilitas, pelayanan imunisasi, puskesmas*

---

\* alimuddin@gmail.com

## PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan unsur dalam kesejahteraan umum yang perlu diimplementasikan sesuai dengan amanat institusi yang dimaksud dalam undang-undang dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang terstruktur berdasar pada Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Indikator kesuksesan dalam pembangunan kesehatan itu dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya manusia yang baik, memiliki keterampilan, serta dirancang dalam suatu program kesehatan dengan rencana yang berbasis data dan informasi yang tidak diragukan.

Salah satu metode pembangunan kesehatan nasional dalam mewujudkan "Indonesia Sehat 2010" ialah penerapan pembangunan nasional kesehatan, yang mempunyai arti setiap langkah program pembangunan harus memiliki dampak positif akan terbentuknya lingkungan sehat serta sikap sehat, sebagai landasan dalam pembangunan kesehatan berpatokan pada konsep paradigma sehat" yaitu pembangunan kesehatan yang berikan prioritas utama pada upaya pelayanan peningkatan kesehatan (Promotif) dan pencegahan penyakit (preventif) dibandingkan upaya pelayanan penyembuhan/pengobatan

(kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan.

Menurut Rohman, dkk (2015:87) berpendapat bahwa imunisasi adalah suatu upaya untuk mendapatkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkan kuman atau produk kuman yang sudah dilemahkan atau dimatikan ke dalam tubuh dan diharapkan tubuh dapat menghasilkan zat anti yang pada saatnya digunakan tubuh untuk melawan kuman atau bibit penyakit yang menyerang tubuh.

Menurut Azheri (2012: 86), tanggungjawab ialah hal yang perlu dipertanggungjawabkan terhadap kewajiban dalam keputusan, kredibilitas, skill, dan kecakapan. berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap aturan yuridis apabila melakukan kesalahan sesuai dengan apa yang telah diperbuat.

Menurut A.S Moenir (1995:17) pada hakikatnya manusia dalam upaya dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya juga tidak lepas dari orang lain. Langkah dalam memenuhi kebutuhan tidak lepas dari campur tangan orang lain yang secara langsung biasa disebut dengan pelayanan. Maka dari itu pelayanan ialah suatu proses kegiatan yang memiliki tujuan untuk membantu

mempersiapkan serta mengurus apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Supaya pelayanan tidak lepas dari kepentingan masyarakat banyak.

Menurut *Moenir (1995:10)*, kepentingan umum ialah suatu kepentingan yang berkaitan dengan masyarakat, tidak bertolak belakang. Dalam norma-norma serta peraturan yang berasal dari beberapa kebutuhan dari masyarakat. Kepentingan itu sifatnya general dan bisa juga bersifat spesifik. Kepentingan umum itu ada karena berasal dari kepentingan seseorang, jadi kepentingan individual dari seseorang bertransformasi menjadi kepentingan umum.

Budiman Rusli dalam Sinambella (2006:3) mengatakan bahwa selama manusia dalam menjalani kehidupannya pasti membutuhkan pelayanan, pelayanan anggapannya sesuai dengan *life cycle theory of leadership (LCTL)* bahwa diawal kehidupan seorang manusia pelayanan yang nyata sangat tinggi, usia manusia pun berpengaruh yang bisa mengakibatkan kebutuhan pelayanan jdai menurun.

Moenir dalam jurnal ilmu administrasi 2 (2008 : 138) menyampaikan pelayanan itu ialah,:

Efektifnya dalam suatu pengurusan kepentingan dalam pelayaan yang responsif. (1)

Mendapatkan pelayanan yang sesuai, yakni pelayanan yang maksimal tanpa embel-embel atau kalimat yang menyinggung.(2) Mendapatkan pelayanan yang adil, tanpa harus melihat siapa orang yang membutuhkan pelayanan. (3) Mendapatkan perlakuan yang jujur dan transparan. Ini berkaitan transparansi pihak yang melayani, contohnya apabila mendapat kendala dalam proses pelayanan maka harus disampaikan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Menurut Kurniawan dalam Sinambella (2006:5) menyampaikan bahwa Pelayanan public ialah proses pemberian layanan untuk memenuhi keperluan masyarakat yang memiliki kepentingan pada instansi sesuai dengan amanat undang-undang dasar. Pelayanan publik ialah bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang berwujud fasilitas- fasilitas umum, baik jasa ataupun sebaliknya, yang dilakukan oleh instansi publik.

Lewis dan Gilman mendefinisikan pelayanan publik sebagai kepercayaan publik. Masyarakat mengharapkan pelayanan publik dapat memberikan pelayanan dengan jujur serta pengelolaan sumber penghasilan secara efektif, dan dapat akuntabilitas. Pelayanan publik yang adil dan dapat berakuntabilitas memberikan

kepercayaan kepada masyarakat. Diperlukan etika pelayanan publik sebagai pondasi dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan *good government*.

Menurut Gronsroos dalam Istujaya (2002, hal15) definisi pelayanan adalah : Sebagai suatu aktifitas yang bersifat tidak kasatmata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diketahui ciri pokok dari pelayanan adalah serangkaian aktivitas dari interaksi yang melibatkan karyawan atau peralatan yang disediakan oleh instansi/lembaga penyelenggara pelayanan dalam menyelesaikan masalah yang menerima pelayanan.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004, pelayanan umum (publik) merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan. Kondisi masyarakat yang semakin kritis, birokrasi publik dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan pelayanan publik. Masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Rasyid (dalam Frederik Mote, 2008), fungsi pelayanan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini adalah untuk melayani masyarakat. Hal ini berarti pelayanan merupakan sesuatu yang terkait dengan peran dan fungsi pemerintah yang harus dijalankan. Peran dan fungsinya itu dimaksudkan selain untuk melindungi juga memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara luas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang terpenting adalah sejauh mana pemerintah dapat mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa (pelayanan) yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya.

Sedarmayanti (2003: 4-5) menyatakan bahwa *governance* mempunyai tiga kaki, yaitu *Economic*

governance meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi terhadap equity, poverty, dan quality of live. 2. Political governance adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan Administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu, institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu state (negara atau pemerintah), private sector (sektor swasta), dan society (masyarakat) yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. State berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, private sector menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.

Menurut Azheri (2012: 86), responsibilitas ialah hal yang perlu dipertanggungjawabkan terhadap kewajiban dalam keputusan, kredibilitas, skill, dan kecakapan. berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap aturan yuridis apabila melakukan kesalahan sesuai dengan apa yang telah diperbuat.

Dwiyanto (2014: 143-144) mengatakan dalam menilai kualitas pelayanan publik, ada beberapa

indicator yang perlu diperhatikan. Menurut Levine, pelayanan publik di suatu Negara yang menganut system demokrasi yang memiliki responsiveness, responsibility, dan accountability. (1) Responsivitas ialah respon terhadap tuntutan dari masyarakat dalam pelayanan kepada masyarakat. (2) Responsibilitas, ialah tolok ukur yang memperlihatkan seberapa efektif proses pelayanan publik dalam penerapannya sesuai dengan ketentuan dari aturan dan landasan dalam melakukan pelayanan. (3) Akuntabilitas, ialah ukuran yang memperlihatkan berapa grafikr proses dalam pelaksanaan pelayanan.

Menurut Atika (2010) macam imunisasi terbagi menjadi yaitu .Imunisasi aktif Imunisasi aktif merupakan pemberian bibit penyakit yang telah dilemahkan (vaksin) agar nantinya sistem imun tubuh berespon spesifik dan memberikan suatu ingatan terhadap antigen ini, sehingga ketika terpapar lagi tubuh dapat mengenali dan meresponnya. Dalam imunisasi aktif, terdapat beberapa unsur vaksin yaitu :1) Vaksin dapat berupa organisme yang secara keseluruhan dimatikan.2) Pengawet, stabilisator atau antibiotik. Merupakan zat yang digunakan agar vaksin tetap dalam keadaan lemah atau menstabilkan antigen dan mencegah

timbulnya mikroba. Cairan pelarut dapat berupa air steril atau juga berupa cairan kultur jaringan yang digunakan sebagai media tumbuh anti gen.b.Imunisasi pasif Imunisasi pasif merupakan pemberian zat (imunoglobulin), yaitu suatu zat yang dihasilkan melalui suatu proses infeksi yang dapat berasal dari plasma manusia (kekebalan didapat bayi dari ibunya melalui plasenta) atau binatang (bisa ular) yang digunakan untuk mengatasi mikroba yang sudah masuk kedalam tubuh yang terinfeksi.

Menurut Lisnawati (2016). Imunisasi adalah memberikan imun tubuh terhadap penyakit dengan menyuntikkan vaksin ke dalam tubuh supaya tubuh memiliki anti bodi terhadap macam penyakit yang berbahaya bagi seseorang.Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit.

Menurut Andhini (2017), Program imunisasi memiliki tujuan dalam membentuk kekebalan tubuh terhadap bayi untuk menekan angka kematian bayi dalam menangani penyakit. Program imunisasi memiliki tujuan yaitu mengurangi angka orang yang terpapar penyakit, cacat dan yang paling parah kematian diakibatkan yang dapat ditangani oleh imunisasi.

Menurut *Keban : 2008* terdapat 3 indikator yang mempengaruhi pelayanan *Good Esekutif Governance* yaitu : 1) Memiliki Komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenangn, (2) Memiliki kebijakan pengelolaan SDM (sumber daya Manusia ), (3) Memiliki kebijka pengelolaan sarana dan prasarana.

Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) diantara 2.400 anak di Indonesia meninggal setiap hari adalah termasuk yang meninggal akibat dari penyakit menular yang seharusnya dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Program imunisasi merupakan program penyelenggaraan pelayanan kesehatan prioritas di Indonesia yang diimplementasikan dari pemerintah pusat hingga daerah. Setiap penyelenggaraan program pelayanan kesehatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Pasitallu kecamatan taka bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, pilihan lokasi sebagai subjek penelitian karena mempunyai beberapa alasan tertentu, antara lain :

Walaupun telah banyak tulisan mengenai responsibilitas pelayanan imunisasi di puskesmas, namun demikian dapat dipastikan bahwa masih

banyak yang perlu di perhatikan dalam pelayanan imunisasi yang di setiap desa. Pengaruh kesadaran keluarga terhadap pelayanan imunisasi yang dilaksanakan pada setiap bulan di posyandu pada masing-masing desa yang di kecamatan taka bonerate.

Jenis yang digunakan penulis sebagaimana yang dijelaskan dalam Menurut Sugiyono (2017), Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode deskriptif, yaitu pengumpulan data dari informasi yang diperoleh, dalam perkataan yang tertulis maupun lisan dari seseorang atau pelaku yang dapat diamati

Data adalah penunjang yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Semakin banyak data yang diperoleh maka semakin bagus pula hasil akhir dari suatu penelitian. Dalam penelitian mengenai responsibilitas pelayanan imunisasi di puskesmas pasitallu kabupaten kepulauan selayar, yaitu sebagai berikut Observasi ,Wawancara Dokumentasi

Analisis data adalah proses analisis kualitatif yang berdasarkan pada hubungan semantis terhadap variabel yang sedang teliti. Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga teknik analisis data yakni (1)Penyajian data

adalah penyajian data ke dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat data yang secara utuh. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif, yakni menguraikan setiap permasalahan dalam permasalahan peneliti dengan memaparkan secara umum kemudian secara spesifik.

Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah penarikan kesimpulan, setiap kesimpulan awal masih kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Puskesmas Pasitallu Terletak di Kecamatan Taka Bonerate yaitu salah satu dari 12 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar, terletak 75 km arah timur dari ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar dan 26 ke arah selatan dari ibu kota Kota Benteng.

Luas wilayah kerja Puskesmas Pasitallu Kecamatan Taka Bonerate adalah 530.765 dan mencakup 9 Desa dan tersebar menjadi pulau-pulau kecil

Responsibilitas Pelayanan Imunisasi Di Puskesmas Passitallu Dalam Perspektif Good Executive Governance Kabupaten Kepulauan Selayar Terjabarkan Dalam Beberapa Poin Yaitu:

## **Memiliki Komitmen Untuk Melaksanakan Tanggung Jawab Dan Wewenang**

Penanggung jawab imunisasi yang diberikan kepada seorang perawat yang kompeten, kemudian pelaksanaannya didampingi oleh 3 Orang bidan juga yang memiliki kompetensi, untuk pelaksanaannya imunisasi di kepulauan penanggung jawab imunisasi yang diberikan kepada seorang perawat yang kompeten, kemudian pelaksanaannya didampingi oleh 3 Orang bidan juga yang memiliki kompetensi, untuk pelaksanaannya imunisasi di kepulauan Setiap masyarakat yang ingin melakukan imunisasi bagi anaknya kami melakukan proses registrasi terlebih dahulu sebelum di timbang sehingga kami mengetahui berat badan setiap anak yang melakukan imunisasi di posyandu.

Kami sebagai masyarakat yang sedang menikmati program imunisasi, sangat terbantu dengan adanya program ini karena kami sebagai ibu dari anak yang sedang terimunisasi tahu tentang kesehatan anak kami, mulai dari penimbangan, pemberian vitamin sampai penyuntikan campak bagi anak yang usia 5 tahun. Dan bukan hanya itu, kami juga bisa mengetahui

perkembangan anak dengan melakukan imunisasi setiap bulannya. Penilaian diawali dengan mengetahui karakteristik bidan Puskesmas lokasi penelitian yang berdinis di Puskesmas induk, pustu atau polindes dan poskesdes di 3 kecamatan yaitu Kecamatan pasi marannu, Kecamatan pasimasunggu dan kecamatan pasimasunggu timur. Karakteristik bidan di Kecamatan pasimarannu menunjukkan 22,9% pada kelompok umur muda ( $\leq 30$  tahun), sedang (31–40 tahun) sebanyak 45,7% dan tua ( $\geq 41$  tahun) sebanyak 31,4%. Masa kerja bidan terbanyak adalah yang  $\leq 5$  tahun sebanyak 17,1%, artinya bidan dengan pengalaman kerja yang masih sedikit. Bidan dengan pengalaman kerja sedang yaitu 6–15 tahun sebanyak 34,3%, sedangkan yang sudah sangat berpengalaman bekerja sebagai bidan ( $> 15$  tahun) adalah sebanyak 48,6%. Gambaran ini menunjukkan bahwa sebagian besar bidan di Kecamatan pasimarannu sudah berpengalaman sebagai bidan. Pendidikan bidan memberi jaminan terkait kompetensinya dalam melaksanakan tugas pelayanan kebidanan di puskesmas. Terdapat 91,4% bidan merupakan lulusan D3 kebidanan dan 5,7% lulusan D4 Kebidanan dan hanya 1 orang lulusan D1 kebidanan. Mereka 57,1% bekerja di

puskesmas induk, sedang yang bekerja di polindes atau desa sebanyak 25,7% dan sisanya sebanyak 17,1% bekerja di pustu. Karakteristik bidan di Kecamatan pasimasunggu menunjukkan bahwa sebagian besar adalah bidan yang sudah berpengalaman terlihat dari usia dan masa kerja. Terdapat 51,4% bidan yang telah berusia di atas 40 tahun dan 48,7% memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun. Pendidikan bidan D1 masih cukup banyak yaitu 21,6% dari seluruh bidan sampel penelitian sedangkan bidan lulusan D3 adalah sebagian besar yaitu 75,2%. Tempat bertugas terbanyak adalah di poskesdes yaitu sebanyak 48,6% dan selanjutnya 35,1% bidan bekerja di puskesmas induk.

### **Memiliki kebijakan pengelolaan SDM**

Mengalami kekurangan dalam hal tenaga keperawatan dimana biasanya yang melakukan suatu pekerjaan seperti timbang menimbang bayi juga dilakukan oleh pegawai sehingga tugas-tugas atau tupoksi mereka menjadi beberapa bagian dalam hal pelayanan. Seperti di ketahui bahwa wilayah kerja puskesmas pasitallu kecamatan taka bonerate kabupaten kepulauan selayar sangat membutuhkan banyak pegawai karena ada enam Desa diluar dari pulau

kecamatan yang memiliki jarak yang begitu jauh dari pulau ke pulau harus naik perahu untuk sampai ke pulau dengan jarak kurang lebih 3 jam itu pun kalau cuaca baik, akan tetapi ketika cuaca lagi kurang baik maka vaksin dan rantai vaksin yang akan dikirim ke pulau akan terhambat dan biasanya butuh waktu sehari hari untuk sampai ke pulau.

dua tugas sekaligus dimana tugas kami admin dan sebagai tenaga medis oleh karena itu kami saling Menyadari bahwa kami ini tidak memiliki banyak tenaga medis, sehingga kami pegawai puskesmas melakukan membantu dalam hal pekerjaan karena, tidak menutup kemungkinan. Perawat juga ikut membantu dalam meregistrasi pasien dan bukan hanya itu kami juga biasanya bergilirang dalam hal menemani pasien yang sedang di rujuk ke rumah sakit di kabupaten, dan biasanya ketika ada pasien yang sedang di rujuk maka otomatis pegawai yang ikut mendampingi akan di alihkan pekerjaan ketika ada pasien yang baru masuk supaya pasien yang baru masuk akan mendapat pelayanan langsung dari pegawai atau perawat puskesmas pasitallu. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam rangka mencapai

sasaran pembangunan kesehatan (Hapsara, 2006). Amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditetapkan bahwa pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 021/MENKES/SK/1/2011 yang diperbaharui dengan Kepmenkes Nomor 32/Menkes/SK/1/2013, dimana salah satu misi Kementerian Kesehatan adalah menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan. Ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan termasuk di dalamnya adalah tenaga kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara efektif sesuai dengan kepentingan masyarakat secara adil, terutama di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan.

### **Memiliki kebijakan pengelolaan sarana dan persarana**

Imunisasi merupakan program nasional yang ada sejak dahulu dengan

tujuan utama adalah menurunkan kejadian penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi (PD3I) yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari Kabupaten Kepulauan Selayar dalam dua tahun terakhir masih terjadi kasus PD3I. Banyak faktor penyebab kasus PD3I diantaranya status imunisasi anak yang tidak lengkap, pengetahuan ibu, status gizi anak, dan kepadatan hunian rumah (Giarsawan 2012 dan Suardiasa 2018). Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kualitas vaksin yang dapat dilihat dengan indikator pada sarana prasarana imunisasi. Berdasarkan alasan diatas, evaluasi program dilakukan pada 25 puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui sarana prasarana imunisasi serta memberikan usulan perbaikan pada program imunisasi. Cakupan imunisasi yang tinggi berbanding terbalik dengan adanya kasus PD3I yang ada Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini menjadi perhatian tersendiri pada sarana prasarana imunisasi yang ada di puskesmas

Sarana refrigerator Vaksin merupakan bahan biologis yang mudah rusak pada suhu 2 s/d 8 °C untuk vaksin sensitif beku atau pada suhu -15 s/d -25 °C untuk vaksin yang sensitif panas (Kemenkes 2017). Pada salah satu

puskesmas dengan refrigerator yang rusak dan vaksin diletakan pada lemari pendingin akan lebih baik meminjam refrigerator pada dinas atau pada puskesmas yang mempunyai refrigerator lebih dari satu. 2. Bunga es atau cairan refrigerator dan software pencatatan Bunga es akan merusak bahan biologis vaksin dan cairan pada refrigerator menjadi resiko konsleting (Kemenkes 2018). Peningkatan pengetahuan dan pelatihan (Ningtyas dkk 2019) atau reword enjadi alternatif untuk meningkatkan motifasi kerja pemegang program imunisasi puskesmas.

Sarana dan Prasarana kesehatan Sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang telah dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat. Prasarana kesehatan merupakan semua fasilitas utama yang memungkinkan sarana kesehatan dapat hidup dan berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Prasarana kesehatan juga merupakan alah satu bagian dari kesehatan nasional, karena prasarana kesehatan merupakan tempat untuk masyarakat mendapatkan pelayanan

kesehatan oleh karena itu prasarana kesehatan harus didukung dengan sarana yang mendukung untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal, mengingat pentingnya fungsi prasarana kesehatan itu sendiri. Prasarana kesehatan juga merupakan sarana utama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Unk itu sarana dan prasarana kesehatan harus terletak pada posisi yang strategis dan tersebar merata diseluruh daerah. Perkembangan wilayah permukiman dan jumlah penduduk yang terus meningkat menimbulkan beberapa masalah diantaranya, pesebaran sarana dan prasarana kesehatan yang tidak merata, fasilitas pendukung yang tidak lengkap, aksesibilitas yang sulit dan lain sebagainya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) No. 75 Tahun 2014 pasal 40, fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan, yang terdiri atas Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, dan bidan desa (UU Puskesmas, 2015:31). Puskesmas Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya

kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat). Puskesmas adalah suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatannya secara menyeluruh, terpadu, berkesinambungan pada suatu masyarakat yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal, tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan (Departemen Kesehatan, 2009:45).

Pengelolaan sarana dan prasarana di tingkat Pengelolaan sumber daya manusia di puskesmas pasitallu itu, penanggung jawab imunisasi diberikan kepada seorang perawat yang kompeten, kemudian pelaksanaannya didampingi oleh 3 Orang bidan juga yang memiliki kompetensi, untuk pelaksanaannya imunisasi di kepulauan yang enam desa pulau itu diberikan tanggung jawab 1 orang di masing-masing pustunya untuk menjalankan imunisasi setiap desa di kepulauan. Prasarana yang ada puskesmas itu berupa kulkas 1 yunik, tenaga surya 1 yunik di lengkapi dengan fulboks sebanyak 3 dan untuk kelengkapan sarana prasarana alhamdulillah memadai sebagai petugas puskesmas pasitallu selalu memberikan pelayanan tentang hal imunisasi bagi masyarakat dalam hal sarana dan prasarana kami selalu memberian vitamin, susu, dan biskuit bagi anak-anak yang terimunisasi di posyandunya masing-masing menjalankan tugas kami sering mendapat kendala dimana, kendala tersebut berupa kurangnya tenaga medis sehingga kami kewalahan dalam memberikan suntikan terhadap anak-anak balita untuk mendapatkan suntikan campak dan vitamin karena biasanya tenaga medis terkadang lambat datang di lokasi dalam hal ini di posyandu.

sebagai kader posyandu juga turut membantu dalam hal pemberian vitamin, susu dan biskuit dan juga kami melayani masalah penimbangan dan pengukuran tinggi dan berat badan anak-anak, dan bukan hanya itu kami juga ikut berpartisipasi dalam hal mengsosialisasikan masalah imunisasi di masyarakat.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai tentang *Responsibilitas Pelayanan Imunisasi Di Puskesmas Pasitallu Dalam Perspektif Good Executive Governance Kabupaten Kepulauan Selayar* yaitu: (1) Penanggung jawab imunisasi yang diberikan kepada seorang perawat yang kompeten, kemudian pelaksanaannya didampingi oleh 30 orang bidan juga yang memiliki kompetensi, masing-masing setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab dengan tupoksi yang berbeda-beda dalam pelayanan imunisasi sehingga pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat maksimal, (2) memiliki kebijakan pengelolaan SDM (sumber daya manusia). Pengelolaan dilakukan dengan setiap anggota diberikan tanggung masing di setiap desa untuk melakukan imunisasi di setiap desa

sehingga pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat khususnya masyarakat Kepulauan Selayar berjalan dengan baik di mana setiap desa diberikan satu orang anggota medis di setiap desa agar kiranya dalam pelayanan imunisasi masyarakat setempat bisa di data sehingga petugas puskesmas mengetahui peserta akan ingin membawa anaknya untuk imunisasi, (4) memiliki kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana sudah memadai dalam hal perlengkapan alat imunisasi perlengkapan yang ada di puskesmas pasitallu sudah baik dimana di puskesmas pasitallu sudah ada satu unit kulkas di mana fungsi kulkas yang ada di puskesmas untuk menyimpan vaskin-vaskin.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Riyanto dan Budiman. (2015). *Kapita Selekta Kuesioner Pengetahuan dan Sikap dalam Penelitian Kesehatan*. Jakarta. Salemba Medika.
- Anwar C. (2017). *Perencanaan Kesehatan Berbasis Fakta dan Belajar dari KLB Polio*. (<http://fpks-dpr.or.id/new/main.php?op=isi&id=1167>, diakses pada 13 Agustus 2017).
- Astrianzah, Delan. (2016). *Hubungan antara Tingkat Pengetahuan Ibu, Tingkat Sosial Ekonomi dengan Status Imunisasi Dasar Lengkap pada Balita* (<http://eprints.undip.ac.id/32936/1>

- /Delan.pdf Akses 07 Januari 2017).
- Ayubi, D. (2015). Kontribusi Pengetahuan Ibu terhadap Status Imunisasi Anak di Tujuh Provinsi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Manusia*.
- Andini, Shinta Wanda Dwi, Sri Mintarti, Tetra Hidayati (2013), "Pengaruh Pengawasan dan Motivasi Terhadap Kinerja dengan Disiplin Kerja Pegawai Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda", *Jurnal Publikasi Ilmiah Universitas Mulawarman Samarinda*, Vol. 1 No. Cochran, William
- Baratawidjaja, (2016). *Imunologi Dasar Ed 11 (Cetakan Ke-2)*. Jakarta. FK UI.
- BKKBN. (2016). *Deteksi Dini Komplikasi Persalinan*. Jakarta. BKKBN.
- BPS (Badan Pusat Statistik) <https://www.bps.go.id/dynamictable/2015/09/07/844/rasio-jenis-kelamin-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-2005-2010-2014-2015.html> Akses 07/01/2018 terbitan 2 Maret 2017
- Cochran, William G. (2015). *Sampling Techniques*. New Delhi: Weseley Eastern Private Limited
- Depkes RI. (2015). *Profil Kesehatan Indonesia*. Jakarta. Departemen Republik Indonesia.
- Destiyanta,& Putra.A (2015). Hubungan Tingkat Pendidikan, Pekerjaan dan Pengetahuan Ibu dengan Ketepatan Jadwal Mengikuti Imunisasi Campak di Wilayah Kerja Puskesmas Weru Sukoharjo. Surakarta. Program Studi.
- Dinas Kesehatan Kota Palembang. (2016). *Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palembang 2015*. Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah.
- Hoy W.K. dan Miskel CG., (2018), *Educational Administration: Theory, Research, and Practice*. New York: Random House, Inc.
- Handoko. T. hani (2016). *Manajemen Kepegawaian*. Yogyakarta: Kanisius Harbani, Pasolong, 2014 *Teori Administrasi Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Human Resource Management Journal, Vol. 24 No.1 2014 Utrecht University: Eva Knies and Peter Leisink, 2013, "Linking people management and extra-role behavior; result of a longitudinal study".
- Keban (2008) Kontribusi Pengetahuan Ibu terhadap Status Imunisasi Anak di Tujuh Provinsi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Manusia*
- Muslimah, Syarifah. (2016). *Responsibilitas Pelayanan Publik pada RSUD Salewangan Kabupaten Maros*. Makassar, Universitas Hasanuddin.
- Mahidin (2017). *Kontribusi Disiplin dan Persepsi tentang Pembelajaran terhadap Keprofesionalan Staf Pengajar Fakultas Tarbiyah IAIN-SU Medan*, Tesis, UNP Padang
- Rahardian, A.H. & Rusantono, B. (2015). Pengaruh Responsibilitas dan Sikap Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Transpatansi.
- Rindawati, Septi & Marjoyo. (2017). *Responsibilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu*. *Jurnal Sosialhumani*
- Saydam, Gozali (2016) *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Mikro*. Jakarta: Djambatan

- Sekretariat Negara (2015). *Gerakan Disiplin Nasional Menyongsong Era Keterbukaan*. Jakarta: Setneg
- Siagian, Sondang P, (2016). *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta: Gunung Agung. Simanjuntak, Payaman J, 2016, *Manajemen dan Evaluasi Kinerja*, Jakarta: FE UI,
- Singgih, Santoso, (2015). *Panduan Lengkap Menguasai SPSS*, Jakarta: Gramedia. Undang-Undang No. 32
- Tahun 2017, *Tentang: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Wahjusumidjo (2017). *Kepemimpinan dan Motivasi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Wursanto (2015). *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Weinstein, Netta and Richard. M. Ryan, 2017. *When Helping Helps:Autonomous Motivation for Prosocial Behavior and Its Influence on Well-Being for theHelper and Recipient: Journal of Personality and Social Psychology*
- Yusmanda (2016) *Kontribusi Disiplin Kerja dan Supervisi terhadap Kinerja Pamong*